

PENEGAKKAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT
STRUKTURAL KOTA GORONTALO DI TINJAU DARI PASAL 3
AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)



SKRIPSI

Firmansyah Lantu

271412011

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah benar-benar asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di Universitas lain.
2. Karya tulis saya ini adalah gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh atau sanksi lain sesuai dengan norma/aturan yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.



FIRMANSYAH LANTU

NIM: 271 412 011

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKKAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT
STRUKTURAL KOTA GORONTALO DITINJAU DARI PASAL 3
AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)**

Di ajukan Oleh : Firmansyah Lantu

NIM : 271412011

Telah Di Periksa dan Di setuju untuk Diuji

Pembimbing I

Pembimbing II



Mutia Ch. Thalib, SH. M.Hum
NIP : 196907041998022001



Novendri M. Nggilu, SH. MH
NIP : 198911272014041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Y. Imran, SH. MH
NIP : 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKKAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT STRUKTURAL
KOTA GORONTALO DITINJAU DARI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN
PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMN/D)**

SKRIPSI

Oleh

FIRMANSYAH LANTU

NIM: 271412011

Telah diperbaiki (revisi) berdasarkan saran penguji dan pembimbing

Penguji :

1. Lisnawaty W Badu, SH., MH
Nip : 19690529 2005012001

(.....)

2. Zamroni Abdussamad, SH., MH
Nip : 197007122003121002

(.....)

3. Hj. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum
Nip : 196907041998022001

(.....)

4. Novendri M. Nggilu, SH., MH
Nip : 198911272014041001

(.....)



Gorontalo, Desember 2016

Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH. M.Hum

NIP. 197011051997031001

ABSTRAK

Firmansyah Lantu, 271 412 011, Judul Skripsi Penegakkan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Struktural Kota Gorontalo Di Tinjau Dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Dibawah Bimbingan Mutia Ch. Thalib, SH. M.Hum sebagai pembimbing utama dan Novendri M. Nggilu, SH. MH sebagai pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pasal 3 ayat 1 Peraturan pemerintah no 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kendaraan dinas.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Penelitian Empiris. Metode penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum serta penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

Hasil Penelitian ini dilihat dari Pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah no 27 tahun 2014 masih belum efektif khususnya di Kota Gorontalo ini, dari fakta yang peneliti dapat dilapangan masih banyak kendaraan dinas yang dipakai tidak pada fungsinya. Penyebab seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan kendaraan dinas yaitu karena bebasnya memakai kendaraan dinas tanpa adanya pengawasan yang signifikan dari pemerintah, Inspektorat, maupun dari pihak masyarakat, dan tentunya juga karena lemahnya sanksi yang berlaku, dan ketidakpedulian dari pejabat itu sendiri.

Kata Kunci : *Penegakkan Sanksi, Penyalahgunaan Kendaraan dinas, Pejabat Struktural, Barang Milik Negara(BMN).*

ABSTRACT

Firmansyah Lantu, 271 412 011, Sanction Enforcement Towards Operational Cost of Service Vehicles Abuse by Structural Official of Gorontalo City Reviewed from Article 3 Paragraph 1 of Government Regulation Number 27 Year of 2014 on State Property Management. Principal supervisor is Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum and Co-supervisor is Novendri M. Nggilu, SH.,MH.

This research aims at investigating and analyzing article 3 paragraph 1 Government Regulation number 27 year of 2014 on state/ regional property management and analysing factors which cause service vehicle abuse.

This research applies empirical research method in which it is legal research encompassing, research on legal identification (unwritten), legal effectiveness and its problem solving will be in detail to investigate, understand and also analyze existed regulation which encounter facts and directly relate to respondents.

Finding can be seen from article 3 paragraph 1 Government Regulation number 27 year of 2014 which is not effective yet, especially in Gorontalo City. Fact known by the researcher is that there are still a lot of service vehicles which utilized not as their real funtions. This abuse may occur since people are free to utilize service vehicles without any significant surveillance from government, inspectorate, or communities and of course, it is also considered as weakness of applied-sanction, and unawareness of the certain officials.

Keywords: Sanction Enforcement, Service Vehicle Abuse, Structural Official, State Property



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling member manfaat bagi lingkungan sekitarnya, oleh karena itu sukses adalah tentang bagaimana kita meraih sesuatu yang dapat member keberkahan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain.

Kupersembahkan karya ini sebagai Dharma Baktiku kepada Ayah dan Ibu. Terima kasih atas segala kasih sayang serta tanggung jawab yang menuntunku sampai pada jenjang sarjana dan menjadi seperti yang kalian banggakan. Terima kasih juga terhadap kerabat-kerabat terdekat yang selalu membantu dan memberi semangat serta doa.

Teruntuk ALMAMATER TERCINTA

Tempat aku menimba ilmu

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan segala sesuatu yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakkan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Struktural Kota Gorontalo Di Tinjau Dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)”

Peneliti membuat proposal skripsi tersebut sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti sadar dengan benar bahwa terdapat berbagai hambatan dan kendala, namun berkat rahmat dari Allah SWT, semangat, rajin, bimbingan dan petunjuk dari dosen pembimbing, serta bantuan semua pihak maka semua permasalahan dapat dihadapi dan di atasi dengan baik oleh peneliti.

Untuk itu melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengajar yang telah membagi ilmu yang tak ternilai harganya kepada peneliti selama peneliti studi S1 Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Teruntuk orang tua tercinta Herson Lantu dan Rauda Igirisa atas semua do'a, jasa, kesabaran, dan tidak pernah mengeluh lelah dalam memberikan pendidikan terbaik dan memberi semua cinta yang tulus dan ikhlas kepada peneliti semenjak lahir, dan kakak Nurlela Lantu serta adik Aditya Lantu. Terima kasih

untuk teman-teman Hukum 2012 yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

Akhirnya, terima kasih terhadap semua yang telah memberikan do'a dan dukungan, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT selalu memberi rahmat terhadap kita semua.

Gorontalo, 1 Desember 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1 Pengertian Penyalahgunaan	8
2.2 Teori Fungsional	8
2.3 Barang Milik Negara.....	10
2.4 Pejabat Struktural	11
2.4.1 Pembebasan dari Jabatan Fungsional	12
2.4.2 Pengangkatan dalam Jabatan Struktural	13
2.4.3 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.....	13

2.5 Pemerintahan.....	14
2.5.1 Pemerintahan Pusat	14
2.5.2 Pemerintah Daerah.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Lokasi Penelitian.....	18
3.3 Jenis Data	19
3.4 Populasi dan sampel.....	19
3.4.1 Populasi.....	19
3.4.2 Sampel.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.6 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum Kota Gorontalo	22
4.1.1 Gambaran Umum Dalam Catatan Sejarah	22
4.1.2 Gambaran Umum Pasca Reformasi	24
4.1.3 Gambaran Umum Kendaraan Dinas Di Kota Gorontalo	25
4.1.4 Jenis-Jenis Penyalahgunaan Kendaraan Dinas	26
4.2 Penerapan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemertintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara	33
4.2.1 Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas	42
4.2.2 Mekanisme Penyelesaian Kasus	45
4.2.3 Laporan 5 Tahun Terakhir Terhitung Dari 2011-2015	46

4.2.4 Daftar Penyalahgunaan Kendaraan Dinas (roda empat) 5 Tahun Terakhir Terhitung dari 2011-2015.....	47
4.3 Rencana Jangka Panjang Pencegahan Penyalahgunaan Kendaraan Dinas oleh Pejabat.....	47
4.4 Pejabat-Pejabat Penanggung Jawab Terhadap Barang Milik Negara	49
4.4.1 Pejabat Pengelola Barang Milik Negara/Daerah	50
4.4.2 Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengguna BMN	54
4.4.3 Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna BMN.....	54
4.4.4 Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Milik Daerah	57
4.5 Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Kendaraan Dinas.....	58
4.5.1 Faktor Internaal	58
4.5.2 Faktor Eksternal	60
BAB V PENUTUP	62
Kesimpulan	62
Saran	63
CURRICULUM VITAE.....	64

DAFTAR PUSTAKA